

**PELUANG DAN TANTANGAN KERJA SAMA *SISTER PROVINCE*  
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
(INDONESIA) DAN PEFEKTUR EHIME (JEPANG)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional

**OLEH :**

**AHADY FEBRIANSYAH**

**E061201020**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PELUANG DAN TANTANGAN KERJASAMA *SISTER PROVINCE* ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (INDONESIA) DAN PEFEKTUR EHIME (JEPANG)

N A M A : AHADY FEBRIANSYAH

N I M : E061201020

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 4 Maret 2024

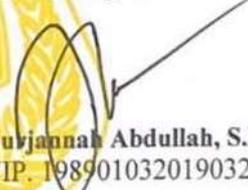


Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.  
NIP. 197210282005011002

  
Nuvjannah Abdullah, S.IP, MA.  
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :  
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,

  
Aswin Baharuddin, S.IP, MA.  
NIP. 198607032014041002

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PELUANG DAN TANTANGAN KERJASAMA *SISTER PROVINCE* ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (INDONESIA) DAN PEFEKTUR EHIME (JEPANG)

N A M A : AHADY FEBRIANSYAH

N I M : E061201020

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 4 Maret 2024.



Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahady Febriansyah  
NIM : E061201020  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : Strata-1

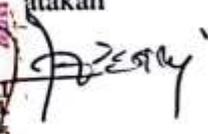
Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul :

**“Peluang dan Tantangan Kerjasama *Sister Province* antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesia) dan Prefektur Ehime (Jepang)”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa benar skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang kecuali kutipan dan ringkasan yang setiap salah satunya saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Januari 2024

atikan  
  
385AKX060465435  
Ahady Febriansyah

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peluang dan Tantangan Kerjasama *Sister Province* antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesia) dan Prefektur Ehime (Jepang)” ini. Shalawat dan tadzlim juga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis dengan segala kerendahan hati tak henti-hentinya merasa bangga dan berterimakasih kepada diri pribadi, setiap orang dan setiap hal yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis pun menyadari skripsi ini masih memiliki kekurangan yang jauh dari kata sempurna sebab keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Selama penyusunan skripsi ini tentunya diikuti oleh dukungan dan Iringan do'a dari berbagai pihak yang berada di sekitar penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga, terkhusus kepada kedua orangtua tercinta saya Bapak **Arham H.an** dan Mama **Sitti Nurlaela S.Pd** yang telag mengasuh, membesarkan dan mendidik dengan sekuat tenaganya. Semoga selalu dalam keadaan sehat wala'fiat dan dilindungi oleh Allah SWT. Kakak terbaik sepanjang masa **Sri Reski Amaliah AR. S.Pd**, **Nurindah Syari AR Amd. Kep**, **Praka Ahmad Ardianyah AR**, **Nurisma Wulandari AR. S.M**, dan Adik tercinta **Afdhal Alamsyah AR**. Yang selalu memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan selalu bisa dimintai pertolongan selama berada di rumah. Sehat Selalu!!
2. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, **Prof. H. Darwis MA. Ph.D**, yang banyak memberi ilmu bermanfaat serta telah menjadi sosok yang menjalankan tugas dengan baik sehingga mahasiswa dapat mendapat kenyamanan selama berkuliah di HI FISIP Unhas

3. Dosen Pembimbing Skripsi, **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si** selaku pembimbing I, dan **Nurjannah Abdullah, S.IP, MA** selaku pembimbing II. Terimakasih banyak atas segala bimbingan, masukan, serta bantuan yang tidak bisa dihitung jumlahnya dalam penelitian ini dan juga sepanjang masa studi penulis.
4. Seluruh tenaga pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas; ; **Drs. Patrice Lumumba, MA, Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M. Si., Drs. H. Husain Abdullah, M. Si., M. Imran Hanafi, MA., M. Ec., Drs. Munjin Syafik Asy'Ari, Ishaq Rahman, S. IP., M.Si., Seniwati S. Sos, M. Hum, Ph. D., Pusparida, Syahdan, S. Sos., M. Si., Burhanuddin, S. IP., M. Si., Muhammad Nasir Badu, Ph. D, Dr. Adi Suryadi B. MA., Atika Puspita Marzaman, S. IP., MA, Nurjannah Abdullah, S. IP, MA, Aswin Baharuddin, S.IP, MA, Bama Andika Putra, S. IP., M. IR., Abdul Razaq Z. Cangara., S. IP., M. IR., Biondi Sanda Sima, S. IP., M. Sc., L. LM., dan Mashita Dewi Tidore, S. IP., MA.** Terimakasih telah memberi Ilmu yang bermanfaat serta lingkungan belajar yang sehat bagi penulis dan juga mahasiswa lainnya.
5. Staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisip UNHAS, **Ibu Rahma, Pak Ridho** dan **Kak Salni** yang banyak membantu penulis terutama terkait dengan administrasi selama masa studi penulis.
6. Sahabat OTW Bola dan Mandalle United FC, khususnya **Fitrah, Ahmad, Ahyar, Agus, Batti, Riski, Ical, Fadlan, Fikri, Firman, Musa** dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi salah satu penyemangat dan menemani penulis dikala membutuhkan hiburan.
7. Alumni SMAN 2 Pangkep angkatan 2020, terkhususnya kelas 12 Exact 1 (EXO) , yang telah menghiasi dan menjadi memori indah untuk penulis.
8. Rekan & Sahabat Penghuni Surga Altera, **Iqbal, Habib, Reza, Rezky, Leo, Raihan, Aal** yang diakhir masa studi berhasil menjadi penyemangat dan rekan berjuang. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk berpetualang,

bercanda, berduka, serta bercerita dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.

9. Teman-teman **PMM 2 Universitas Sebeles Maret**, terkhusus untuk Uno Geng; **Defri, Ahal, Emil, Haidir, Satriya, Jo, Rein, Surni, Oca, Lia, Parni, Resna, Sovia, Khansa**. Terimakasih selalu menjadi penyemangat dan pernah berbagi cerita selama PMM 2 berlangsung. See you on top guys...
10. Teman-teman **Altera 2020**. Khususnya **Nirzam, Ratu, Nanda, Natasya, Cacac, Alya, Chusnul, Auni, Ius, Oni, Regina, Ica, Alifa, Aula, Ashar, Amirah, Cikal, Dhea, Faje, Fikri, Reul, Rofi, Sonia, Aliyah, Anes, Aswin, Nisa, Ana, Karisma, Lisa, Alfreda, Firan, Gabriela, Wafiq, Wafiq, Elen, Jihan, Asnur, Patricia, Naufal, Thania, Jeje, Jasmine, Nathanael, Wilda, Raffy, Rady, Nades, Ainun, Yaya, A'yun, Mars, Fitrah, Ginayah, Lilis, Juzeila, Shita, Syawal, Uga, Ochang, Fadel, Ardan, Putri Angreni, Vioren**, dan teman-teman **Altera lain yang tidak kalah penting bagi penulis**. Terima kasih sudah menjadi warna-warni cerita bagi masa kuliah penulis. Penulis sangat bersyukur menjadi bagian dari sekumpulan orang hebat seperti kalian. Penulis berharap 129 orang ini akan mendapatkan kebahagiaan tertinggi dalam hidup. Sampai berjumpa di masa depan yang baik.
11. Tim **MBKM** dan Penghuni Rektorat Lantai 7, Khususnya **Bu Nunu, Pak Aspar, Kak Arif, Kak inna, Kak Selvi, Kak Mifta, Kak Cimma, Osmah, Fahrizal**. Terimakasih telah menerima dan menjadi keluarga kedua dikampus penulis, semoga MBKM tetap Berjaya.
12. **UKM Radio Kampus EBS FM Unhas**, Khususnya teman-teman Rotasi yang menjadi sahabat dan rumah kedua bagi penulis, menjadi tempat berkemabang penulis, mengajarkan banyak softskill bagi penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya.
13. **Penggerak Muda Pasar Rakyat**, Teman-teman magang kampus Merdeka kota makassar yang menjadi sahabat pasar dan teman berkembang lainnya. Terimakasih atas pengertiannya.

14. **UKM Sepak Bola Fisip Unhas**, yang walaupun baru akrab dan aktif di tahun akhir penulis, namun tetap memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis. Terimakasih untuk Fisip Unhas, Bersama, Bersatu, Berjayaa.
15. **Genbi SulSel**, Khususnya teman-teman Deputi Public Relations periode 2023/2024 yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih atas wadah dan pengalaman berharga menjadi penerima Beasiswa Bank Indonesia.
16. **Teman-teman KKN Posko Soreang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar**, yang juga memberikan pembelajaran berharga dan kebersamai penulis dalam melakukan pengabdian. Terimakasih atas kenangan-kenangan indahny.
17. Kelompok **Modul Nusantara 9** dibawah bimbingan Dosen Bu Winda, dan Mentor Mbak Sita. Yang telah mengajari dan memberikan banyak pengalaman berharga bagi penulis. Terimakasih banyak.
18. **Autentik Coffe Autentik Coffee** sebagai tempat ternyaman bagi penulis dalam proses pengerjaan penelitian ini. Terima kasih sudah memberi kenyamanan lewat suasana hiruk pikuk dan juga hangatnya secangkir kopi.
19. **Pemilik NIM E061211111** yang selalu mendampingi, menyemangati dan membantu penulis disetiap saat, yang memberikan semangat luar biasa untuk penulis selama masa studi. Terimakasih lop <3.
20. **Semua pihak lain yang membantu penulis baik dalam pengerjaan penelitian ini maupun selama masa studi penulis**. Terima kasih kepada semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis. Semoga semua pihak dibalaskan kebaikannya dan dipermudah urusannya di masa yang akan datang.
21. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, *I'm proud to be my self, and u deserve all the praise for all of the work that you've done*. Semoga

kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menggapai semua cita-citanya.

Penulis sangat bersyukur atas keberadaan segala pihak yang telah membantu penulis selama masa studi penulis. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama ini banyak melakukan kesalahan yang sekiranya merugikan. Penulis berharap dengan selesainya proses ini menjadikan penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi penulis mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kelak semua pihak yang terlibat mendapatkan hal baik dalam hidup. *Wabillahi taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## ABSTRAK

**Ahady Febriansyah, E061201020, “Peluang dan Tantangan Kerja sama *Sister province* antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesia) dan Prefektur Ehime (Jepang), di bawah bimbingan Ishaq Rahman S.IP, selaku pembimbing I dan Nurjannah Abdullah, selaku pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.**

Penelitian ini berisi tentang kerjasama *sister province* dari Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari Indonesia dan Prefektur Ehime dari Jepang. Pada penelitian ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang merupakan peluang dari kerjasama ini dan apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh kedua pihak. Metode Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode kajian Pustaka dengan mengeksplorasi dan mereview berbagai literatur. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara yang dilakukan di beberapa tempat seperti Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, seluruh data dianalisis secara kualitatif dan untuk pembahasan masalah menggunakan pola deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kerja sama *sister province*, Pemerintah Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime telah melakukan serangkaian kegiatan kerja sama luar negeri yang dibuktikan dengan Nota Perjanjian Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* antara kedua kota. Berdasarkan kesepakatan ini, kerja sama *sister province* antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime kemudian menghasilkan 4 bidang kerja sama yang diharapkan mampu mendorong potensi perekonomian dan Pembangunan serta menjadi peluang yang baik untuk kedua wilayah. Ditemukan bahwa adanya kesamaan kedudukan dan status administrasi, Adanya kesamaan karakteristik dan potensi, serta adanya kesamaan permasalahan dan upaya saling melengkapi adalah peluang-peluang yang bisa diambil. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam berlansungnya kerja sama *sister province* ini.

**Kata Kunci : Kerja sama *Sister province*, Pemerintah Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, Prefektur Ehime, Memorandum of Understanding**

## ABSTRACT

**Ahady Ahady Febriansyah, E061201020, "Opportunities and Challenges of *Sister province* Cooperation between the Provincial Government of South Sulawesi (Indonesia) and Ehime Prefecture (Japan), under the guidance of Ishaq Rahman S.IP, as supervisor 1 and Nurjannah Abdullah, as supervisor II, at the Department of Energy International Relations Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.**

This research contains *sister province* collaboration between the South Sulawesi Provincial Government from Indonesia and Ehime Prefecture from Japan. In this research the author will state the opportunities for this collaboration and the challenges faced by both parties. The research method in preparing this thesis uses descriptive-analytic research type. The data collection technique used by the author is using the library review method by exploring and reviewing various literature. Apart from that, this research also used interview methods conducted in several places such as the South Sulawesi Provincial Government Bureau. In this research, all data was analyzed qualitatively and to discuss the problem using a deductive pattern.

The results of this research show that in implementing *sister province* cooperation, the South Sulawesi Government and Ehime Prefecture have carried out a series of foreign cooperation activities as evidenced by a Memorandum of Understanding between the two cities. Based on this agreement, *sister province* cooperation between South Sulawesi Province and Ehime Prefecture then resulted in 4 areas of cooperation which are expected to be able to encourage economic and development potential and become good opportunities for both regions. It was found that the same position and administrative status, the same characteristics and potential, as well as the same problems and complementary efforts are opportunities that can be taken. However, there are several challenges and obstacles in the continuation of this *sister province* cooperation.

**Keywords: *Sister province* Cooperation, Regional Government, South Sulawesi Province, Ehime Prefecture, Memorandum of Understanding**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Paradiplomasi.....	22
B. Sister province.....	30
C. Penelitian Terdahulu.....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KERJA SAMA SISTER PROVINCE PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PEFKATUR EHIME .....</b>	<b>41</b>
A. Profile Sulawesi Selatan dan Ehime .....	41

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Kerja sama Sister province Sulawesi Selatan-Ehime.....	53
C. Tahapan Pelaksanaan Kerja sama Sulawesi Selatan-Ehime .....	55
<b>BAB IV PELUANG DAN TANTANGAN KERJA SAMA SISTER PROVINCE ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PEFEKTUR EHIME .....</b>	<b>67</b>
A. Peluang Kerja sama Sister province antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime.....	67
B. Tantangan Kerja sama Sister province Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime.....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pemikiran Kerangka Konsep .....	9
Gambar 2 Pola hubungan internasional yang bersifat transnasional yang melibatkan Local Government (Pemerintah Daerah) sebagai aktor dalam hubungan internasional. ....	23
Gambar 3 Kategori Paradiplomasi .....	29
Gambar 4 Cakupan paradiplomasi multifungsi.....	35
Gambar 5 Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan .....	43
Gambar 6 Produksi Tanaman Perkebunan unggulan Sulsel (BPS Pemprov Sulsel,2019) .....	44
Gambar 7 Statistik Kunjungan Wisatawan Asing Ke Sulsel .....	47
Gambar 8 Peta Wilayah Prefektur Ehime .....	49
Gambar 9 Gubernur Sulsel dan Wakil Gubernur Ehime bertemu dan Membicarakan kemungkinan menjadikan kedua daerah sebagai provinsi kembar .....	57
Gambar 10 Proses Penandatanganan Letter of Intent Kerja sama sister province Sulsel-Ehime.....	59
Gambar 11 Kerja sama sister province antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan Pemerintah Prefektur Ehime Jepang, telah disetujui seluruh fraksi di DPRD Sulsel melalui rapat Paripurna.....	61
Gambar 12 Proses penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Sulawesi Selatan dan Ehime. ....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara .....	102
Lampiran 2 Surat Persetujuan DPRD tentang kerja sama sister pronce Sulawesi Selatan. ....	110
Lampiran 3 Letter of Intent Kerja sama sister provinve antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime.....	113
Lampiran 4. Memorandum of Understanding Kerja sama sister provinve antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime.....	114
Lampiran 5 Draft Memorandum of Agreement Kerja sama sister province antara Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime dan Balasan dari Prefektur Ehime terkait bidang Perikanan.....	118
Lampiran 6. Draft Memorandum of Agreement Kerja sama sister province antara Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime dan Balasan dari Prefektur Ehime terkait bidang Perkebunan. ....	122
Lampiran 7 SK Tim Kelompok Bersama Sister province.....	127

## **BABI PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penelitian ini membahas tentang praktik paradiplomasi yang dituangkan dalam kerja sama internasional oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari Indonesia dan Prefektur Ehime dari Jepang. Kerja sama internasional ini berbentuk *sister city/sister province* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kota kembar/provinsi kembar, sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kedua wilayah baik Provinsi Sulawesi Selatan maupun Prefektur Ehime. Kerja sama yang dilakukan ini merupakan suatu peluang bagi kedua belah pihak untuk saling meningkatkan perekonomian, khususnya pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan pemerintah daerah Sulawesi Selatan seperti bidang kelautan, pertanian, peternakan, perkebunan, pendidikan serta pariwisata (Marsya, 2021). Namun, tentunya kerja sama ini tidak terhindar dari tantangan dan hambatan baik itu dalam proses pembentukan kerja sama, maupun dalam penerapannya terhadap keduanya. Maka dari itu, penulis akan menjelaskan dan menganalisis peluang dan tantangan dari kerja sama ini sehingga nantinya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kerja sama ini.

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pulau Sulawesi merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Sulawesi Selatan memainkan peran penting dalam lanskap geografi dan ekonomi nasional. Dengan wilayah yang mencakup berbagai jenis lahan,

mulai dari pesisir pantai yang indah hingga pegunungan yang tinggi, Sulawesi Selatan memiliki potensi alam yang sangat beragam. Daerah ini juga menjadi pusat kegiatan perdagangan dan transportasi di wilayah timur Indonesia, dengan pelabuhan penting seperti yang ada di Makassar mendukung konektivitas antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pesisir Provinsi ini dikenal dengan kehidupan laut yang makmur dan tradisi maritim yang kuat, sementara pegunungan menjadikan daerah ini sebagai destinasi pariwisata yang populer dengan keindahan alam dan budaya yang unik. Pertanian, perikanan, dan industri juga berperan penting dalam perekonomian provinsi Sulawesi Selatan (Sulselprov.go.id, 2019).

Dalam mengikuti arus globalisasi, Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sebuah praktik paradiplomasi. Sulawesi Selatan mempunyai beberapa hubungan kerja sama luar negeri dengan wilayah lain yang berasal dari Lembaga atau Organisasi yang berasal dari luar negeri. Salah satu contoh kerja sama yang dilakukan yakni kerja sama *sister province*, yakni kerja sama internasional dengan pemerintah daerah setingkat provinsi diluar negeri (Amra & Benyamin L, 2023).

Secara singkat, terminologi *sister province* berasal dari turunan konsep paradiplomasi yakni *sister city*. Adapun untuk menjelaskan fenomena ini, banyak ahli memberikan terminologi-terminologi lain, seperti *twinning city/province*, *friendship-city*, *city-to-city* dan masih banyak lagi (Natarajan et al., 2021). Namun pada penelitian ini, terminologi yang digunakan adalah *sister province*. Alasan menggunakan istilah itu dikarenakan berpedoman pada istilah

yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja sama Lembaga di Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri melalui Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Di Indonesia sendiri, praktik kerja sama seperti ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan, Namun sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Kerja sama paradiplomasi ini telah menjadi agenda wajib bagi pemerintah daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian, atau untuk mengikuti arus globalisasi dan teknologi yang begitu cepat. Hal ini didukung dengan adanya pemberian otonomi daerah dari pusat sehingga pemerintah daerah baik itu setingkat provinsi, kabupaten/kota dengan bebas menentukan dan dapat melakukan kerja sama internasional sesuai perundang-undangnya (Mukti, 2020).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Sulawesi Selatan saat ini telah melakukan kerja sama *sister province* dengan pemerintah daerah setingkat diluar negeri yakni pemerintah daerah Prefektur Ehime dari Jepang. Tujuan dari kerja sama ini, selain untuk meningkatkan persahabatan kedua wilayah ini, juga sebagai upaya peningkatan nilai diberbagai sektor di kedua wilayah (Marsya, 2021). Prefektur Ehime dipilih dikarenakan jika dilihat dari segi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki, prefektur ini memiliki kemiripan karakteristik. Hal ini bisa dilihat di berbagai sektor yang menjadi andalan bagi Prefektur Ehime seperti pertanian, Perkebunan dan perikanan. Hal

ini tentunya memiliki kemiripan dengan sektor-sektor yang juga menjadi andalan bagi provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga harapannya sektor-sektor ini akan saling memanfaatkan guna mencapai tujuan bersama. Terutama provinsi Sulawesi Selatan menginginkan ilmu dan teknologi yang diterapkan oleh pemerintah Ehime (Amra & Benyamin L, 2023).

Prefektur Ehime juga melihat Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang besar terlebih lagi jika berkaitan dengan hasil produksi di berbagai sektor yang sebelumnya sudah dijelaskan Keuntungan yang bisa dilihat dari Prefektur Ehime dalam hal ini dapat berupa kerja sama ekonomi seperti peluang di sektor kelautan, pertanian, pariwisata ataupun manufaktur. tidak hanya itu peluang pertukaran teknologi, SDM, dan investasi tentunya akan sangat menggiurkan (Safitiri, 2020)

Melihat peluang tersebut, kedua pemerintah tertarik untuk melanjutkannya menjadi kerja sama *sister province*. Maka, pada tanggal 15 Januari 2019, Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Gubernur Nurdin Abdullah dan Prefektur Ehime yang diwakili oleh Gubernur Tokihira Nakamura melakukan penandatangan pernyataan kehendak atau *Letter of Intent (LoI)* di Baruga Karaeng Pattinggaloang, Makassar, Indonesia. Dalam LoI ini tercantum fakta bahwa kedua pihak mengakui prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan serta memuat pernyataan kehendak tentang penguatan sumber daya manusia, perdagangan, keparawisataan, pertanian, perikanan, peternakan, Pendidikan, budaya, olahraga, dan dapat diperluas keberbagai bidang lainnya (Sulselprov.go.id, 2020).

Kemudian, sebagai tindak lanjut dari Penandatanganan LoI tersebut, pada tanggal 16 Desember 2020, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan Gubernur Prefektur Ehime Tokihira Nakamura serius dan menindak lanjuti LoI tersebut dengan menyetujui dan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan secara daring via *Zoom Meeting*. Pada MoU ini juga turut hadir Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Jepang, Heri Akhmadi, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementrian Dalam Negeri, Dr.Heriyandi Roni,M.Si dan juga Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani; dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel dan seluruh rombongan lainnya. Dalam MoU tersebut dijelaskan bahwa hubungan kerja sama *sister province* ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang yang isinya merupakan perjanjian kerja sama di berbagai bidang yakni Bidang Ikan dan Industri Laut, Pertanian dan Perkebunan, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia manusia (SDM) (Sulselprov.go.id, 2019)

Pada kesimpulannya, adanya kerja sama *sister province* ini akan sangat berdampak baik bagi Sulawesi Selatan dan Ehime jika mengacu pada kesepakatan-kesepakatan yang telah terjadi. Hal ini akan menjadi peluang bagi keduanya dalam meningkatkan perekonomian di daerah masing-masing. Namun terlepas dari peluang yang bisa didapatkan, tidak menutup kemungkinan bahwa kerja sama ini menghadapi tantangan-tantangan dan juga hambatan dalam penerapannya. Penulis telah menemukan beberapa peluang jika kerja sama ini berhasil dilaksanakan, dan juga penulis secara singkat telah melihat beberapa

tantangan dan hambatan yang dilalui oleh kedua pemerintah dalam kerja sama ini. Maka kemudian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut mengenai kerja sama ini yang kemudian dituangkan dalam penelitian yang diangkat oleh penulis yang berjudul **“Peluang dan Tantangan Kerja Sama *Sister province* antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesia) dan Prefektur Ehime (Jepang)”**

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Kerja sama *sister province* antara pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime sejatinya telah berlansung sejak lama. Namun, secara resmi penandatanganan MoU dalam rangka kerja sama *sister province* antara kedua wilayah baru pada tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membatasi masalah program kerja sama *sister province* ini sesuai dengan yang tertulis pada MoU yakni pada tahun 2020 hingga dengan tahun 2025, sesuai yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan batasan masalah diatas, Adapun rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peluang dari kerja sama *sister province* antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime?
2. Apa yang menjadi tantangan serta hambatan dari kerja sama *sister province* antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime?

Peluang yang dimaksud oleh penulis adalah potensi manfaat yang akan diterima oleh Sulawesi Selatan sendiri maupun dari Prefektur Ehime. Sedangkan, tantangan yang dimaksud adalah hal-hal yang membuat kerjasama ini. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ada pemahaman yang lebih baik

tentang konsep kerja sama *sister province* yang dilakukan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime, yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan penting, evaluasi bagi pengambil kebijakan, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang sudah di paparkan diatas, tujuan dilakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peluang yang dihasilkan dari kerja sama *sister province* antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi tantangan serta hambatan kerja sama *sister province* antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua kalangan, secara khusus hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari dua sisi yakni:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan pembaca khususnya akademisi dan mahasiswa program studi hubungan internasional dalam memahami ilmu pengetahuan lebih lanjut tentang paradiplomasi dan *sister province* yang dalam hal ini terdapat pada kerja sama Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime. Sehingga memperbanyak

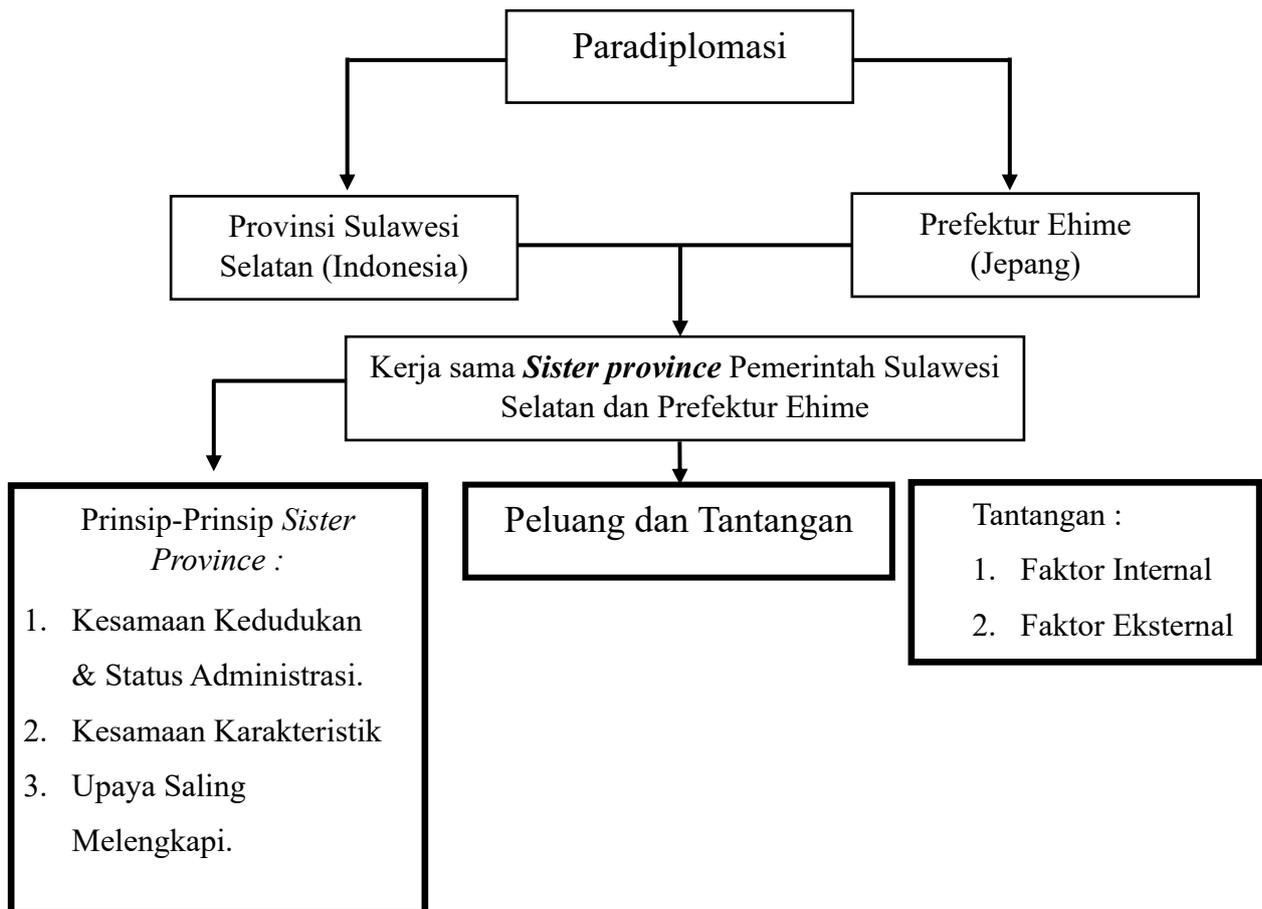
analisis interaksi hubungan aktor *sub-state* atau non-negara sebagai alat dan pemain baru dalam studi ilmu hubungan internasional

## **2. Manfaat Praktis**

- a) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk dapat melihat dan mengevaluasi kerja sama yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai alat untuk lebih meningkatkan program kerja sama.
- b) Membantu pemerintah daerah lain sebagai acuan dan referensi dalam mencari dan melaksanakan praktik paradiplomasi khususnya kerja sama *sister province* sehingga dalam proses penyusunan strategi kerja sama dapat menjadi lebih baik.
- c) Menjadi bahan evaluasi bagi kepala pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperbaiki hubungan kerja sama *sister province* ini,

## E. Kerangka Konseptual

Gambar 1 Alur Pemikiran Kerangka Konsep



Penelitian ini menggunakan Konsep Paradiplomasi dan Konsep *Sister Province* untuk menganalisis peluang dan tantangan kerjasama *sister province* antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime. Kedua konsep ini merupakan kerangka konseptual yang sangat relevan untuk memahami bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menjalankan kerjasama *sister province* dengan pemerintah daerah lainnya. Selain itu, konsep ini juga

membantu penulis menjawab rumusan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya.

## 1. Paradiplomasi

Konsep paradiplomasi adalah sebuah konsep yang dijadikan pendekatan oleh berbagai pemerintah daerah untuk melakukan hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah diluar negeri atau Lembaga diluar negeri. Salah satu tujuannya adalah untuk mempromosikan dan meningkatkan perdagangan, dan berbagai potensi kerja sama dengan pihak-pihak lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Takdir Ali Mukti, memberikan pandangan bahwa Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “*sub-state*”, pemerintah lokal/regional/pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Aktor-aktor tersebut memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi dan berbagai potensi kerja sama dengan pihak-pihak yang berada diluar batas resmi negara (Mukti, 2015).

Konsep paradiplomasi kemudian menjadi pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah hubungan internasional oleh aktor daerah. Duchaeck menjelaskan Paradiplomasi memiliki tiga tipe, yaitu Paradiplomasi Lintas Batas Wilayah (*Regional Trans-border Paradiplomacy*), Paradiplomasi Lintas Wilayah (*Trans-regional Paradiplomacy*) dan Paradiplomasi Global (*Global Paradiplomacy*) (Aldecoa & Keating, 2018). Tipe tersebut sebagai Berikut :

- a) Paradiplomasi Lintas Batas Wilayah *Wilayah (Regional Trans-border Paradiplomacy)*, mengarah pada sebuah kerja sama “rezim kooperatif” yang mengacu pada interaksi terbatas secara regional antara pemerintah daerah pinggiran dan provinsi, negara bagian, contonal, atau lander governments.
- b) Paradiplomasi Lintas Wilayah *(Trans-regional Paradiplomacy)*, mengacu pada trans-sovereign atau Dimana adanya kontak antara pemerintah non-pusat yang tidak bertetangga secara geografis tetapi memiliki pemerintah nasional
- c) Paradiplomasi Global *(Global Paradiplomacy)* melibatkan kontak langsung antara pemerintah non-pusat di satu negara dengan mitra sub-nasional mereka di negara-negara yang jauh (tidak bersebelahan), pemerintah pusat

Dari ketiga tipe yang dijelaskan, kerja sama hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ehime tergolong tipe Paradiplomasi Global. Salah satu bentuk dari kerjasama pemerintah daerah dalam melakukan hubungan luar negeri yakni antara lain; *sister city*, *sister province*, *twinning-city* dan lain-lain.

## **2. Sister Province**

Praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime merupakan kerja sama internasional yang dituangkan dalam bentuk *sister province*. *Sister province* atau umumnya dikenal dengan *sister city* jika dilaksanakan oleh kabupaten atau kota, merupakan

kerjasama antar dua wilayah antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya di luar negeri.

Kerja sama Sister province adalah bentuk kerja sama antara pemerintah daerah tingkat provinsi yang didukung oleh *Memorandum of Understanding* sebagai dasar hukum bagi kedua belah pihak dalam berbagai bidang. Kerja sama ini melibatkan kemitraan masyarakat dalam pertukaran mahasiswa, pariwisata, pertukaran kota, pengembangan bisnis tradisional, dan perdagangan. Secara mendasar, kerja sama ini merupakan bentuk diplomasi multitrack dan bertujuan sebagai sarana diplomasi publik suatu negara melalui hubungan antar orang untuk mencapai kepentingan bersama yang saling menguntungkan antara dua negara, umumnya dilakukan dalam jangka waktu panjang maupun pendek (Primawanti et al., 2019)

Tujuan dari kerja sama sister province adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga persahabatan berdasarkan kesamaan karakteristik dalam sejarah, budaya, dan geografi. Kerja sama ini didasarkan pada program-program yang tetap dan terencana, termasuk bidang kerja sama, tujuan, dan biaya masing-masing pihak. Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menjaga persahabatan internasional, perdamaian dunia, serta menjadi terobosan baru dalam mencari pasar dan mempromosikan investasi (Cohen, 2021).

Kemudian, untuk melakukan sebuah hubungan *sister province* pemerintah daerah diharuskan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan. Dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peraturan Menteri Luar

Negeri No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2020, dijelaskan ada beberapa persyaratan dalam penyelenggaraan kerjasama *sister province* yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor terbentuknya kerjasama *sister province*, persyaratan tersebut adalah :

a) Kesamaan Status Administrasi,

Provinsi-provinsi yang menjadi *sister province* biasanya memiliki kedudukan dan status administrasi yang serupa. Ini berarti mereka mungkin memiliki struktur pemerintahan yang mirip, seperti gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Kedudukan dan status administrasi yang serupa memungkinkan adanya pemahaman yang lebih baik antara kedua pihak dalam mengelola urusan pemerintahan daerah dan mengatasi masalah yang mungkin timbul.

b) Kesamaan Karakteristik

Kesamaan karakteristik dapat mencakup berbagai aspek, seperti budaya, sejarah, ekonomi, dan geografi. Misalnya, provinsi-provinsi yang berada di wilayah yang sama atau memiliki warisan budaya yang serupa cenderung memiliki kesamaan dalam hal budaya dan sejarah. Kesamaan ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program-program kerja sama dalam bidang pariwisata, pelestarian budaya, atau pengembangan industri kreatif. Di sisi lain, provinsi-provinsi yang memiliki struktur ekonomi yang serupa atau tantangan lingkungan yang sama dapat berkolaborasi dalam mengembangkan solusi yang efektif.

### c) Kesamaan Permasalahan dan Upaya Saling Melengkapi

Provinsi-provinsi yang menjadi sister province seringkali menghadapi permasalahan yang serupa, seperti kemiskinan, pengangguran, atau kerusakan lingkungan. Dalam kerja sama ini, mereka dapat bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana mengatasi masalah tersebut. Misalnya, jika sebuah provinsi berhasil menerapkan program pengentasan kemiskinan yang efektif, mereka dapat berbagi strategi dan pelajaran yang dipetik kepada provinsi saudaranya. Selain itu, mereka juga dapat bekerja sama dalam proyek-proyek yang saling melengkapi, di mana keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh satu provinsi dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh provinsi lainnya, menciptakan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

## F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diperlukan, dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu penulis merangkum metode yang digunakan sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pemahaman tentang suatu masalah atau fenomena yang akan digambarkan secara deskripsi. Penelitian kualitatif mengacu pada pemahaman menyeluruh terhadap gejala

yang dialami sasaran penelitian, seperti perbuatan, pemahaman, dorongan, serta tindakan, melalui bentuk teks dan penggambaran (Moleong, 2018).

Kemudian secara khusus, penulis menggunakan tipe deskriptif-analitik yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan tentang keadaan berupa fakta-fakta yang masih relevan dengan argument atau pendapat. Sehingga dapat diuraikan dengan analisis yang berujung dengan kesimpulan. Tipe ini digunakan oleh penulis karena sesuai dengan kebutuhan penelitian dimana penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan fakta yang telah ditemukan tentang peluang dan tantangan kerja sama *sister province* Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime.

Dalam tipe penelitian, semakin dalam, lengkap, serta tereksplorasi data yang diperoleh pun dapat diartikan semakin bagus kualitas penelitiannya. Jadi melalui perspektif banyak narasumber atau subjek riset, proses penelitian kualitatif lebih sedikit subjeknya dibandingkan penelitian kuantitatif karena mengutamakan ketajaman data dibandingkan kuantitas data. Dengan pendekatan tipe penelitian ini, penulis akan menjabarkan bagaimana peluang dan tantangan kerja sama *sister province* antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah Pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-

jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Selain itu karena Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data lain yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a) Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan focus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai *sister province* beserta peluang dan tantangannya. Disamping itu, Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti.

Arsip

Arsip yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini meliputi arsip yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang resmi mengenai kerja sama *sister province* antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime. Publikasi baik itu melalui official website milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun artikel-artikel terkait.

Dengan demikian, rekaman arsip tersebut dapat memperkuat analisis dalam penelitian ini

b) Observasi

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan yang berkaitan dengan kerja sama ini. dengan teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan terhadap berbagai peristiwa-peristiwa di Provinsi Sulawesi Selatan dalam melihat implementasi program-program kerja sama *sister province* Sulawesi Selatan dan Ehime.

c) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui *interview* dengan tokoh-tokoh yang terkait dengan kerja sama ini yang kemudian disebut dengan informan. Untuk keperluan penelitian ini maka informan merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dalam kerja sama ini, maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kerja sama ini. Kemudian mekanisme dari wawancara yang akan dilakukan ialah melalui *face to face*, dan via email jika terjadi kendala dan beberapa hambatan. Hal ini dilakukan demi menjaga validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun tempat-tempat yang akan dilakukan penulis dalam melakukan pengumpulan data, antara lain.

- 1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemrov SulSel
- 2) Perpustakaan Universitas Hasanuddin

3) Tempat-tempat yang lain yang berkaitan dengan kerja sama ini.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui :

- a. Observasi yaitu dengan melihat secara langsung penerapan *sister province* Sulawesi Selatan – Ehime;
- b. Wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait program-program *sister province* Provinsi Sulawesi Selatan-Ehime. Adapun yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah bertempat di Kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sub-bagian kerja sama.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen, dan hasil olahan yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun data sekunder yang dibutuhkan adalah dokumen-dokumen resmi kerja sama ini, website-website resmi, internet, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan kerja sama ini.

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

### **5. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan yaitu, metode deduktif dimana diawali dengan mempunyai pikiran utama serta memberikan pandangan mulai ke yang umum dan spesifik luar ke pandangan khusus (umum-khusus). Metode deduktif merupakan Teknik penalaran yang digunakan dalam ilmu guna mencapai pada kesimpulan yang tepat secara sistematis. Pertanyaan umum (atau hipotesis) mampu disajikan serta diuji kemungkinannya buat mencapai pada kesimpulan khusus yang terbukti secara valid (Fadli, 2021)

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dibawah ini adalah uraian penjelasan singkat sistematika penulisan yang akan peneliti susunkan secara terstruktur ke dalam lima bab, antara lain ;

**BAB I Pendahuluan** mencakup latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II Tinjauan Pustaka** Merujuk pada deskripsi teoritis terkait variable-variabel yang akan diteliti dengan menguji argument dan tinjauan konsep/teori yang relevan sebagai rujukan studi riset penelitian. Pada penelitian ini tinjauan Pustaka yang akan dijelaskan yakni berkaitan dengan konsep otonomi daerah dan paradiplomasi.

**BAB III Gambaran Umum** akan membahas tentang Sejarah kerja sama antar kota/provinsi di dunia. kemudian dilanjutkan membahas mengenai latar belakang kerja sama *sister province* yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Ehime. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang MoU kerja samanya.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan** membahas mengenai peluang kerja sama *sister province* antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ehime. Selain itu juga di bab ini dijelaskan mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kerja sama ini.

**BAB V Penutup** membahas tentang kesimpulan. Bab ini merupakan penutup berisi tentang penjelasan ringkas dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

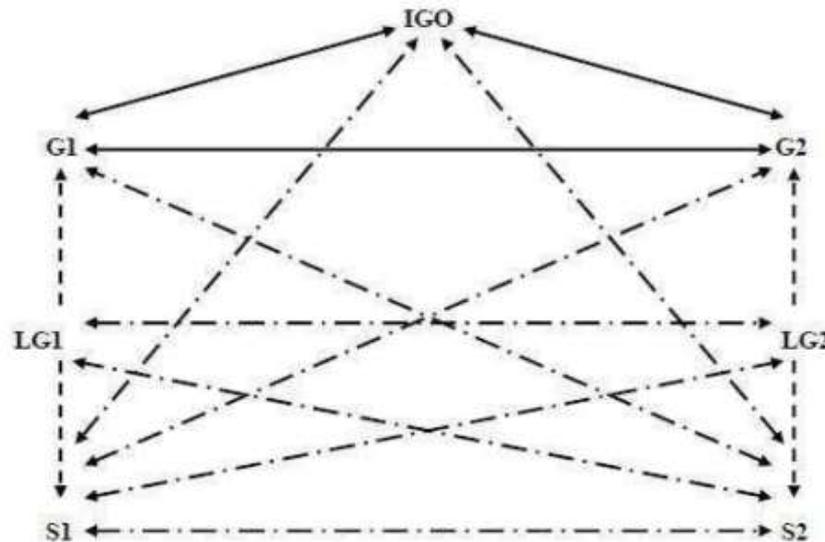
### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, substansi akan berfokus pada kajian literatur terkait 2 (dua) konsep yang menjadi acuan analisis pada penelitian ini, yaitu elaborasi terkait konsep paradiplomasi yang menjelaskan peran sub-state menjadi aktor dalam hubungan internasional, dan konsep *sister province*. Kemudian, dilanjutkan dengan penelaahan literatur dan penelitian terdahulu terkait variable yang ada pada penelitian yang memberi sumbangsih pada penelitian kali ini.

#### **A. Paradiplomasi**

Perkembangan globalisasi yang semakin meningkat seperti saat ini Dimana batas-batas negara yang dikenal dengan konsep kedaulatan (*sovereignty*) mengalami “pengerusan”, yang telah mengubah praktik diplomasi. Sekarang, diplomasi tidak hanya bertujuan untuk mencapai perdamaian, tetapi juga untuk mengatasi konflik dan masalah yang dihadapi suatu negara guna mencapai tujuan bersama. Saat ini, praktik diplomasi tidak lagi terbatas pada negara dan pihak asing, melainkan juga melibatkan aktor non-negara seperti organisasi internasional, organisasi non-pemerintah internasional (INGO), organisasi pemerintah internasional (IGO), dan perusahaan multinasional (MNC), serta pemerintah daerah atau regional, seperti pemerintah provinsi atau kota (Weber,2001). Munculnya aktor-aktor ini mempengaruhi pengembangan model hubungan yang bersifat transnasional. Hal itu bisa digambarkan pada skema berikut ini (Jatmika, 2001)

Gambar 2 Pola hubungan internasional yang bersifat transnasional yang melibatkan Local Government (Pemerintah Daerah) sebagai aktor dalam hubungan internasional.



Sumber : Jatmika, 2021

Keterangan :

———— Hubungan politik antar negara

----- Hubungan politik dalam negeri

- . - . - Hubungan transnasional

G : *Government* (Pemerintah Pusat)

LG : *Local Government* (Pemerintah Daerah)

S : *Society* (Masyarakat)

IGO : *Inter Government Organization* (Lembaga Internasional)

Kegiatan yang dilakukan oleh sub-state atau aktor non-negara tersebut memiliki banyak istilah. Ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan akhir di kalangan akademisi mengenai istilah yang lebih nyaman untuk mendefinisikan

kegiatan eksternal pemerintah subnasional/substate. Para peneliti biasanya lebih memilih untuk tidak membuang-buang waktu mereka pada perdebatan terminologi dan lebih suka menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan kenyamanan mereka. Oleh karena itu, ada banyak istilah untuk menjelaskan fenomena tersebut. Konsep yang paling sering dipakai yakni “paradiplomasi”. Selain itu ada terminologi lain yang juga digunakan dalam menjelaskan hal ini, seperti *constituent diplomacy*, *regional diplomacy*, *sub-state diplomasi*, *microdiplomacy*, *multilayered diplomacy*, *catalyc diplomacy*, *protodiplomacy*, *post-diplomacy*, dan lain-lain (Kuznetsov, 2014)

Diantara terminologi-terminologi yang sebelumnya dijelaskan, Istilah paradiplomasi adalah yang paling sering digunakan. Paradiplomasi awal munculnya dalam perdebatan akademik digagas oleh seorang ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos pada tahun 1980-an. Soldatos menggabung istilah diplomasi paralel (*parallel diplomacy*) menjadi paradiplomasi, hal ini mengacu pada pengertian “*the foreign policy of non-central government*” (Mukti, 2013) Kemudian, dalam tulisan, Aguirre mendefinisikan paradiplomasi sebagai pendekatan yang melibatkan pendekatan semiologis dan analisis intertekstual yaitu menyebutkan bahwa kegiatan ini merujuk pada kegiatan keterlibatan eksternal (dalam bidang sosioekonomi, keamanan, dan energi) oleh pemerintah sub-nasional/provinsi dalam system federal dan unitaris. Meskipun keterlibatan global pemerintah subnasional/provinsi sering berjalan sejajar dengan pemerintah pusat namun cenderung lebih spesifik dan terarah dan seringkali bersifat oportunistis dan eksperimental (Aguirre, 1999)

Di berbagai literatur banyak menyebutkan bahwa istilah paradiplomasi ini pertama kali dicetuskan oleh Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos, yang kemudian secara luas dipublikasikan di North American discourse, terutama kaitannya dengan federalisme. Pada dasarnya upaya pertama dalam mengadopsi istilah paradiplomasi dalam literatur ilmu sosial dilakukan oleh Rohan Butler pada tahun 1961, Ketika menerbitkan bab dengan judul “paradiplomacy” dalam monograf kolektif berjudul *“Studies in Diplomatic History and Histoigraphy*. Sebagai sejarawan hubungan internasional, Rohan Butler mendefinisikan paradiplomasi sebagai Tingkat tertinggi diplomasi personal dan parallel, yang melengkapi atau bersaing dengan kebijakan luar negeri regular dari menteri yang bersangkutan. (Cornago, 1999)

Selain itu, dalam buku yang berjudul Politik Paradiplomasi (Mukti, 2020) Paradiplomasi adalah suatu aktivitas luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah local atau subnasional seperti provinsi, kota, atau wilayah otonom, yang mana ini mencakup interaksi mereka dengan entitas diluar batas negara mereka, seperti melakukan kerja sama ekonomi, keamanan, atau mengembangkan hubungan budaya dengan pihak luar negara, terlepas dari kebijakan luar negeri resmi yang diatur oleh pemerintah pusat.

Kemudian, pertama kali istilah paradiplomasi muncul dalam artikel Ivo Duchacek yang berjudul *“The International Dimension of Sub-National Self-Governments* yang dipublis dalam jurnal Publius tahun 1984. Istilah paradiplomasi hanya muncul sekali, sebagai istilah umum untuk mengidentifikasi mikrodiplomasi regional dan global yang lintas batas negara.

di artikel ini juga Ivo Duchacek menjelaskan bahwa istilah mikrodiplomasi adalah istilah yang singkat dan digunakan karena tidak ada konsep yang lebih baik. Namun, setelah beberapa tahun, dalam menulis artikel-artikel yang menyinggung fenomena ini, secara bertahap mulai mengganti istilah mikrodiplomasi menjadi paradiplomasi (Kuznetsov, 2014). Selain itu, dia juga turut serta secara luas dalam merumuskan definisi dan menciptakan tipologi konsep ini. sebagai contoh, dalam bukunya *“The Territorial Dimension of Politics: Within, Among, Across Nations* yang dipublis pada 1987.

*[...] The various initiatives taken by non-central governments on the international scene have so far assumed four distinct yet interconnected forms: (1) transborder regional microdiplomacy, (2) transregional microdiplomacy, (3) global paradiplomacy, and (4) protodiplomacy. [...] By transborder regional microdiplomacy, I mean transborder formal and, above all, informal contacts, which are dominantly conditioned by geographic proximity and the resulting similarity in the nature of common problems and their possible solutions. [...] Transregional microdiplomacy is the term used to describe connections and negotiations between non-central governments that are not contiguous. [...] Global paradiplomacy consists of political functional contacts with distant nations that bring non-central governments into contact not only with trade, industrial or cultural centers on other continents but also with various branches or agencies of foreign national governments. [...] Protodiplomacy is the term that may be used to describe those initiatives and activities of non-central governments abroad that graft a more or less separatist message onto its economic, social and cultural links with foreign nations. (Kuic & Duchacek, 1987)*

Definisi dan tipologi aktivitas luar pemerintah regional dalam tulisan-tulisan Duchacek memang tidak mengalami pembaruan yang signifikan, namun istilah mikrodiplomasi sepenuhnya digantikan menjadi paradiplomasi di tulisan-tulisan selanjutnya. Kemudian, Soldatos yang merupakan rekan Ivo Duchacek mendukung kerangka penjelasan paradiplomasi menjadi istilah utama untuk menggambarkan keterlibatan subnasional dalam urusan internasional. Akhirnya,

Duchacek dan Soldatos kemudian menjadikan istilah paradiplomasi menjadi istilah yang umum dan diterima banyak kalangan akademis pada masa itu, hal ini dikarenakan kesuksesan istilah paradiplomasi menjadikan tidak memiliki istilah alternatif lain untuk menjelaskan konsep ini.

Berasal dari itu, lahirlah banyak istilah-istilah baru untuk menggantikan istilah paradiplomasi dalam menjelaskan fenomena tersebut. Sebagai contohnya John Kincaid seorang peneliti Amerika pada 1985 mengusulkan penggunaan istilah *constituent diplomacy* dibanding *paradiplomacy* (Kuznetsov, 2014) Kincaid berpendapat bahwa :

*[. . .] What to call this activity? [...] Paradiplomacy, but “para” means along side of, to one side, aside from; or secondary. [...] Constituent diplomacy captures the idea that states, provinces, cantons, Länder, and the like are constituent units of federal polities. In the United States, for example, the states are co-sovereign constitutional polities with the federal government, not sub-national governments (Kincaid, 2010).*

Memang benar bahwa penggunaan istilah "diplomasi konstituen" sebagai pengganti "paradiplomasi" dapat membantu menetapkan batasan konsep dan menghindari ambiguitas dalam perlakuan konsep tersebut. Awalan "para" mungkin membingungkan karena hanya menekankan tindakan yang berlangsung sejajar dengan diplomasi negara tradisional, namun tidak memberikan penjelasan tentang sifat kekuatan yang mendorong aktivitas paralel ini. Oleh karena itu, John Kincaid benar bahwa, dari sudut pandang semiologis, istilah "diplomasi konstituen" lebih maju karena menunjukkan siapa pelaku yang melakukan aktivitas diplomatik-unit konstituen/pemerintah. (Kuznetsov, 2014)

Selain itu, Brian Hocking juga memberikan usulan daripada menggunakan istilah *paradiplomacy*, lebih baik menggunakan istilah *multilayered diplomacy* dan mendeskripsikannya sebagai *densely textured web*. Dimana pemerintah non-pusat mampu mencapai berbagai tujuan pada berbagai tahap dalam proses negosiasi. Dengan melakukannya, mereka dapat menjadi lawan dari tujuan nasional, tetapi sejajar dengan itu, mereka juga dapat bertindak sebagai sekutu dan agen dalam mencapai tujuan tersebut (Hocking, 1993)

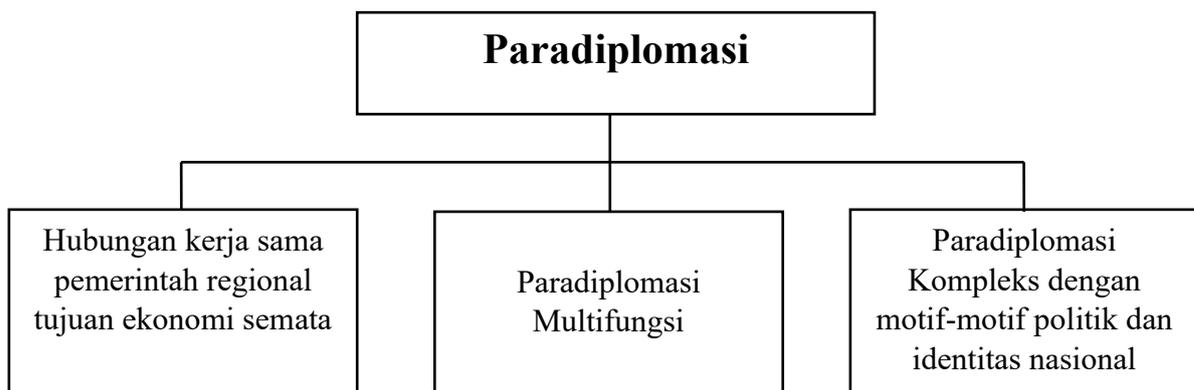
Namun dalam penelitian ini, penulis akan memasukkan fenomena hubungan kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan Prefektur Ehime kedalam klasifikasi istilah *paradiplomasi*. *Paradiplomasi* yang dimaksud yakni istilah yang di kemukakan oleh Kuznetsov dalam bukunya yang berjudul *Theory and Practice of Paradiplomacy*.

*I define the term paradiplomacy in this book and for further research purposes as a form of political communication for reaching economic, cultural, political, or any other types of benefits, the core of which consists in self-sustained actions of regional governments with foreign governmental and non-governmental actors. (Kuznetsov, 2014)*

*Paradiplomasi* dalam praktiknya di negara-negara maju telah berlangsung cukup lama, menurut Lecours (dikutip dalam Mukti, 2013) praktik *paradiplomasi* yang mereka lakukan diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori, yakni, pertama, sebuah hubungan dan kerja sama pemerintah regional (*sub-state*) yang hanya pada tujuan ekonomi semata, misalnya perluasan pasar dagang, pengembangan investasi ke luar negeri, ataupun investasi timbal balik. Kedua, *Paradiplomasi* yang melibatkan berbagai bidang dalam kerja sama atau

multifungsi antara ekonomi, Pendidikan, kebudayaan, ahli teknologi, dan Kesehatan dan sebagainya. Ketiga, ialah paradiplomasi kompleks yang melibatkan berbagai motif-motif politik serta identitas nasional wilayah spesifik. Pada kategori ini, mereka berusaha menjalin hubungan internasional atau luar negeri dengan kecendrungan yang tinggi dan menunjukkan identitas nasional wilayah mereka yang spesifik serta otonom yang berbeda dengan Sebagian besar wilayah di negara Merdeka (Mukti,2013) . Ketiga kategori tersebut digambarkan pada gambar berikut ini

Gambar 3 Kategori Paradiplomasi



(Sumber : Mukti,2013)

Terdapat beragam bentuk paradiplomasi yang melampaui sekadar pencarian investasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan semata. Konsep ini juga mencakup interaksi melalui kemitraan *sister city/sister province*, upaya bersama dalam proyek kolaboratif, serta serangkaian kunjungan delegasi antar entitas sub-nasional (Neves 2010). Dalam konteks ini, penulis memilih untuk mengambil fokus pada kerja sama *sister province*, sebuah bentuk kolaborasi

yang melibatkan pemerintah daerah dari negara yang berbeda. Tujuan dari eksplorasi konsep paradiplomasi ini adalah untuk menyelidiki lebih dalam tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama yang bermakna dan berkelanjutan dengan pemerintah daerah lain di negara asing. Melalui hubungan ini, terbuka peluang untuk memperluas jaringan kerja sama, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh wilayah-wilayah tersebut, serta mempromosikan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antar pemerintah daerah. Dengan demikian, kerja sama antar *sister province* menjadi sebuah instrumen yang penting dalam memperluas cakupan diplomasi lokal serta membangun hubungan yang erat antara entitas sub-nasional di seluruh dunia..

## **B. *Sister province***

*Sister province* atau yang lebih dikenal dengan nama *sister city* sering juga disebut dengan *twinning city* atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan istilah kota kembar, adalah kerja sama antar kota yang bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka Panjang. Ada banyak penyebutn untuk menggambarkan fenomena ini seperti, *twinning city*, *sister city*, dan masih banyak lagi. Namun, istilah yang paling sering dipakai dan telah disepakati oleh kota-kota di Amerika Serikat yang tergabung dalam *sister cities international (SCI)* yang berpusat di Washington DC adalah istilah *sister city/sister province*.

"*Sister city/Sister province*" merupakan istilah yang diciptakan untuk menggambarkan hubungan formal antara dua kota atau wilayah pemerintahan lokal yang berbeda negara. Konsep ini muncul dengan tujuan awal yang diusung

oleh Presiden Eisenhower pada tahun 1950-an, yang bertujuan utama adalah 'untuk meningkatkan pemahaman internasional dan memupuk perdamaian melalui perluasan komunikasi internasional serta pertukaran pada tingkat antarpersonal melalui keterikatan antar kota (Ramasamy & Cremer, 1998). Dengan menjalin hubungan sebagai kota kembar, terbuka peluang bagi keduanya untuk membangun hubungan yang erat dan saling memperkaya. Melalui pertukaran budaya, pendidikan, dan pengalaman sosial, kota-kota tersebut dapat belajar satu sama lain, memperdalam pemahaman tentang keanekaragaman budaya, serta memperkuat toleransi dan kerja sama lintas batas. Hubungan ini bukan hanya tentang pertukaran formal di tingkat pemerintahan, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk berinteraksi secara langsung, mempromosikan keberagaman, dan membangun jembatan yang menghubungkan perbedaan. Dalam esensi, kota-kota kembar menjadi panggung bagi diplomasi rakyat yang mendalam, mendorong pertukaran pikiran dan nilai-nilai yang mendasar, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas dan keterhubungan antara masyarakat global.

Pendapat lain tentang *sister city/sister province* merupakan konsep kerja sama antar dua kota, dua provinsi atau dua negara yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya, ekonomi, dan kontak sosial antar penduduk secara berkesinambungan. Secara umum, *sister city* adalah adanya dua buah kota yang secara resmi saling terikat dengan suatu tujuan tertentu, baik itu mempromosikan perdamaian, pertemanan, ataupun

perasaan saling mengerti antara orang-orang yang berada didalamnya (Souder et al., 2005).

Senada dengan penjelasan diatas, Sinaga menjelaskan *sister city/sister province* adalah bentuk kerja sama antara kota di dua negara yang memiliki berbagai tujuan, yaitu yaitu pertumbuhan ekonomi, promosi budaya nasional, dan pembentukan kerja sama formal di bidang lain. Kesamaan antara kedua kota dalam hal demografi, minat, dan masalah dapat menjadi alasan terbentuknya *sister city*. Oleh karena itu, kerja sama ini akan menjadi wadah untuk mewujudkan saling menguntungkan dan membangun hubungan yang kuat antara kota dan negara. Selain itu, ada jangkauan yang lebih luas yaitu kerja sama pemerintah daerah antara kedua negara (Sinaga, 2010)

Dalam melaksanakan kerja sama *sister province* ini, tentunya memiliki beberapa prinsip yang seringkali digunakan sebagai landasan, meskipun antara satu kerja sama dengan kerja sama lainnya prinsip ini dapat berbeda-beda (Kelowna, 2010). Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

- i. Similaritas – adanya kesamaan bersama;
- ii. Pertukaran – adanya potensi pertukaran dalam segi budaya, edukasi, rekreasi, ataupun ekonomi;
- iii. Hubungan timbal balik – pertukaran yang sifatnya positif harus berjalan dari dua arah;
- iv. Berorientasi pada masyarakat – adanya kepemimpinan yang aktif, keterlibatan dan dukungan oleh masyarakat, melalui organisasi

- ataupun bisnis yang sudah ada untuk membangun ataupun memelihara hubungan yang sudah ada;
- v. Manfaat strategis – manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang didapat dari hubungan melebihi biaya publik yang harus dikeluarkan untuk menjalin ataupun memelihara hubungan yang sudah ada;
  - vi. Eksklusivitas & Kedekatan – tidak memiliki hubungan *sister city* dengan kota lainnya di negara yang sama atau lokasi yang berdekatan dari lokasi calon *sister city*;
  - vii. Kestabilan politik – kondisi politik yang stabil di negara tempat *sister city* berada, sesuai dengan hasil pengumuman dari pemerintah pusat

Selain itu, turunan dari konsep paradiplomasi ini juga memiliki beberapa karakteristik (Salma, 2015) , yaitu.

- i. Merupakan sebuah kesepakatan formal yang dilakukan dengan berdasar sebuah surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh walikota;
- ii. Didasari oleh sebuah niat baik (*good intention*);
- iii. Model implementasinya tidak hanya satu proyek melainkan beberapa *sharing activities*, yang mana rencana kerja sama *sister city* dapat dibentuk melalui pertimbangan rencana pembangunan daerah yang kesimpulannya dapat dilihat dalam bidang/ruang lingkup yang akhirnya diajukan untuk concern implementasi kerja sama..

Sehingga konsep kerja sama *sister city/province*, berdasarkan pada gambar diatas dikelompokkan ke dalam kategori kedua, yakni paradiplomasi multifungsi. Paradiplomasi multifungsi menekankan bahwa entitas sub-nasional tidak hanya terlibat dalam diplomasi tradisional (misalnya, hubungan antarnegara yang dilakukan oleh pemerintah pusat), tetapi juga terlibat dalam berbagai bidang dan kegiatan internasional. Ini bisa berupa kerja sama ekonomi, *sister city/sister province*, Pendidikan, Kesehatan, pertanian, kebudayaan dan kesenian, teknologi, bantuan tenaga ahli, bantuan teknis (Mukti, 2013).

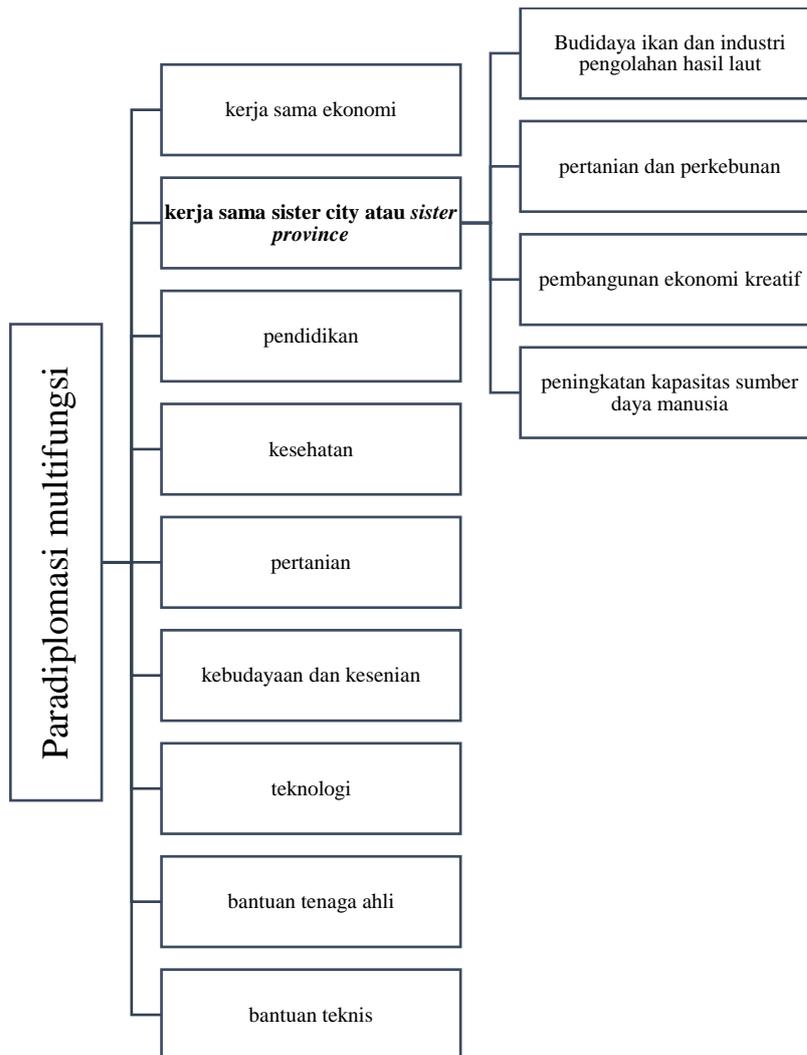
Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan paradiplomasi tidak hanya terbatas pada urusan politik atau diplomatik, tetapi juga melibatkan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan untuk memperluas jaringan kerja sama di tingkat internasional.

Dalam paradiplomasi multifungsi ini menjadikan MoU (Memorandum of Understanding) sebagai legalitas untuk menyatakan bahwa kedua pemerintahan berada dalam negara yang berbeda telah melakukan kerja sama. Sehingga dalam melaksanakan berbagai bidang kerja sama dapat sesuai dengan arah dan tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam kasus ini, pemerintah Sulawesi Selatan dan Ehime telah menyepakati MoU yang mana kemudian, inilah yang menjadi landasan dari kerja sama *sister province* yang dibangun.

Maka untuk itu, untuk menganalisis kategori paradiplomasi multifungsi yang berkaitan dengan kerja sama *sister province* dengan menggunakan

landasan MoU, penulis menjabarkannya dalam sebuah gambar mengenai cakupan paradiplomasi ini. berikut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4 Cakupan paradiplomasi multifungsi



(Sumber : Analisis Penulis)

Berdasarkan gambar diatas ini, penulis akan menjelaskan penelitian ini dengan acuan paradiplomasi multifungsi yang berfokus pada peranan pemerintah daerah dalam kerja sama *sister province* dengan menggunakan

prinsip-prinsip *sister province* Adapun prinsip yang dimaksud adalah adanya kesamaan kedudukan dan status administrasi, kesamaan karakteristik, kesamaan permasalahan, dan adanya upaya saling melengkapi.

### C. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijabarkan penelitian terdahulu terkait peran-peran pemerintah daerah dalam perannya melakukan praktik paradiplomasi atau hubungan kerja sama luar negeri. Hal ini dilandasi oleh isu yang dibahas dalam penelitian ini yakni terkait dengan kerja sama *sister province* yang menitik fokuskan penelitian kepada dinamika kerja samanya serta meneliti peluang dan tantangan dari kerja sama *sister province* antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime. Sehingga, peneliti memerlukan gambaran terkait yang ada pada penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan acuan tambahan pada penelitian kali ini.

Penelitian pertama dari Dien Mawaddah yang berjudul Kerja sama *Sister province* Jawa Barat-Australia Selatan (2012-2015). Penelitian ini berfokus mengenai praktik kerja sama hubungan *sister province* antara Provinsi Jawa Barat dengan Negara Bagian Australia Selatan yang mana pada konteks ini, kedua wilayah memiliki kesetaraan/setingkat dalam hal administrative negara. penelitian ini membahas tentang kerja sama yang berlangsung dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Dimana dari penelitian ini, memberikan hasil yang menunjukkan bahwa praktik paradiplomasi yang dilaksanakan oleh kedua pemerintah daerah sampai kepada tahap dilakukannya revitalisasi. Pada tahap ini, implementasi dari kerja sama antara kedua provinsi memberikan dampak

signifikan dalam usahanya meningkatkan potensi-potensi kedua belah pihak dalam berbagai bidang yang telah disepakati (Mawaddah, 2022).

Penelitian kedua yang dijadikan bahan referensi adalah penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Menjalin Kerja sama Internasional dengan Prefektur Ehime” yang ditulis oleh A. Rinaldy Jaharuddin, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Pada penelitian ini, berfokus kepada pembahasan bagaimana proses terjadinya kerja sama sister provinsi dalam hal pembentukan kerja sama provinsi kembar. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama antara kedua provinsi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kerja sama *sister province* antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime melalui beberapa tahap seperti peninjauan, rekomendasi kementerian, Persetujuan DPRD, penandatanganan LoI, dan penandatanganan MoU.

Penelitian Ketiga yang dijadikan rujukan adalah penelitian skripsi karya M. Priyudi Ekanda, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Penelitian ini berjudul “Dampak Kerja sama *Sister city* Kota Bandung dengan Kota Suwon Dalam Bidang Kebudayaan dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Budaya di Kota Bandung Periode 2008-2013. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa arus globalisasi terus mempengaruhi sifat hubungan internasional yang bercorak transnasional, menjadi kecendrungan dunia pada saat ini. Kerja sama tersebut tidak hanya sebatas pada hubungan antar negara, melainkan sudah merambat

keranah pemerintah daerah yang menjadi aktir baru dalam hubungan internasional. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelskan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Suwon khususnya dalam perkembangan kebudayaan di Kota Bandung itu sendiri melalui program kerja yang telahditentukan dan yang telah diimplementasikan

Penelitian selanjutnya yakni sebuah tesis dari E.N. Dombolovoy NST, Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian in berjudul “Implementasi Kerja sama *Sister city* Kota Bandung Dengan Kota Suwon Tahun 1997-2015. Penelitian ini dijelaskan bahwa kerja sama *sister city* merupakan sebuah bentuk paradiplomasi yang memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama internasional. Kota Bandung yang merupakan kota yang memiliki banyak keunggulan memberikan sebuah ketertarikan kepada pemerintah daerah lain baik itu di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan hubungan kerja sama. Salah satunya kerja sama *sister city* yang dilakukan oleh Kota Bandung adalah kerja sama *sister city* dengan Kota Suwon dari Korea Selatan.

Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa kerja sama ini sudah berlangsung sejak tahun 1997 mmengalami pasang surut dalam implementasi program kerja samanya. Focus pada penelitian ini berfokus pada alasan yang menjadikan kerja sama ini mengalami pasang surut, yang kemudian dalam temuannya dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Di faktor internal, agenda seperti perubahan kebijakan

pemerintah, perbedaan agenda prioritas, serta pergantian pemimpin memberikan pengaruh terhadap kerja sama ini. Sedangkan faktor eksternalnya seperti krisis ekonomi global, konflik politik, kurangnya komunikasi dan faktor eksternal politik menjadi alasan tambahan mengapa hubungan kerja sama ini mengalami pasang surut.

Kemudian, penelitian terakhir yang dijadikan acuan adalah penelitian Skripsi yang berjudul Peluang dan Tantangan Kerja sama *Sister city* antara Kota Makassar dan Gold Coast yang di tulis oleh Dion Darmawan Warsuqni, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini berfokus membahas kerja sama *sister city* Pemerintah Kota Makassar dengan Kota Gold Coast dari Australia. Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk membahas peluang-peluang kerja sama yang menjadi bidang-bidang kerja sama antara kedua kota. Selain itu, penulis juga berusaha untuk menjelaskan tantangan yang dilewati dalam proses kerja sama ini.

Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa peluang dari kerja sama yang dilakukan di beberapa bidang, seperti pada bidang Pendidikan dan pengembangan SDM, pada bidang promosi kebudayaan dan pariwisata, pada bidang perdagangan dan jasa, dan membuat hubungan bilateral Indonesia dan Australia menjadi lebih baik. Sedangkan untuk tantangan dari kerja sama ini yakni seperti, hambatan regulasi dari pemerintah Indonesia yang masih rumit, mewabahnya Covid-19, dan Bahasa. Di akhir pada penelitian ini disimpulkan bahwa kerja sama *sister province* ini, berdasarkan golongan efektifitas kerja

sama, termasuk kedalam partially implemented atau Sebagian di Implementasikan. Alasannya adalah ditemukan tantangan dan hambatan selama berlansungnya kerja sama. Namun untuk beberapa sektor masih ada yang sementara berjalan.